

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAUR

MENURUT PENGELUARAN
2013-2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAUR

MENURUT PENGELUARAN

2013-2017



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN KAUR MENURUT PENGELUARAN 2013 - 2017

ISSN : -
Nomor Publikasi : 17040.1802
Katalog BPS : 9302020.1704

Ukuran Buku : 21 x 29,7cm
Jumlah Halaman : xiv + 62 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Neraca Konsumsi Provinsi Bengkulu

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Dicetak Oleh:
Percetakan Fazzy

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
KABUPATEN KAUR
MENURUT PENGELUARAN 2013 - 2017**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Arbi

Editor : Fera Kurniawati, SST

Penulis : Febrina Ramana, SST

Pengolah Data : Febrina Ramana, SST

Desain Cover : Catur Didi Wahyudi, SST., M.Si

<https://kaurkab.bps.go.id>

<https://kaurkab.bps.go.id>

Kata Pengantar

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen data serta penerapan *System of National Accounts (SNA) 2008* pada penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur kembali menerbitkan seri baru Publikasi PDRB Kabupaten Kaur menurut Pengeluaran 2013-2017 berdasarkan Tahun Dasar 2010 (2010 = 100).

Publikasi ini menyajikan secara deskriptif laporan perkembangan ekonomi Kabupaten Kaur yang ditinjau dari sisi pengeluaran. Tabel yang disajikan adalah nominal PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010, serta tabel turunannya seperti distribusi PDRB, pertumbuhan, indeks perkembangan dan indeks implisit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian publikasi ini. Kami juga mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk penyempurnaan publikasi berikutnya. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para konsumen data.

Bengkulu, Agustus 2018

BPS Kabupaten Kaur
Kepala,



Ir. Arbi

Daftar Isi

	Uraian	Hal
	Halaman Judul	ii
	Kata Pengantar	v
	Daftar Isi	vii
	Daftar Tabel	ix
	Daftar Gambar	xi
	Daftar Lampiran	Xii
	Ringkasan Eksekutif	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
	1.2. Kegunaan Data PDRB	4
BAB II	METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
	2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
	2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
	2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
	2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
	2.5. Perubahan Inventori	21
	2.6. Ekspor Impor	25
BAB III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KAUR DARI SISI PENGELUARAN TAHUN 2013 - 2017	27
	3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kaur menurut Pengeluaran	29
	3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	34
	3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	39
	3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	39
	3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	41
	3.6. Perkembangan Perubahan Inventori	42
	3.7. Neraca Perdagangan (Trade Balance)	43

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN KAUR MENURUT PENGELUARAN 2013 - 2017	45
	4.1. PDRB (Nominal)	47
	4.2. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	48
	4.3. <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	49
BAB V	PENUTUP	51
LAMPIRAN		55

<https://kaurkab.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel	Uraian	Hal
Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017	29
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	30
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	32
Tabel 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017	33
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	34
Tabel 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	35
Tabel 7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	36
Tabel 8.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	37
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kaur, Tahun 2013 – 2017	38
Tabel 10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRK Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	39
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	40
Tabel 12.	Perkembangan PMTB Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	42
Tabel 13.	Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	43
Tabel 14.	Perkembangan Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	44
Tabel 15.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kaur, Tahun 2013 – 2017	47

Tabel 16.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	48
Tabel 17.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	50

<https://kaurkab.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar	Uraian	Hal
Grafik 1.	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur, Tahun 2013 - 2017	31

<https://kaurkab.bps.go.id>

Daftar Lampiran

Tabel	Uraian	Hal
Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017	57
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017	58
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017	59
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017	60
Tabel 5.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017	61
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017	62

Ringkasan Eksekutif

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional. Pendekatan yang digunakan dalam publikasi ini adalah PDRB menurut pengeluaran. PDRB menurut pengeluaran adalah total seluruh komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Publikasi ini menyajikan perkembangan PDRB Kabupaten Kaur menurut pengeluaran selama periode 2013-2017. Periode konstan yang digunakan dalam penghitungan PDRB ini adalah tahun dasar 2010. Selama kurun waktu lima tahun (2013-2017), kondisi perekonomian Kabupaten Kaur yang terus menunjukkan arah positif. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur tahun ini menurun 0,23 persen poin dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan kondisi ekonomi Kabupaten Kaur digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan total PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Kaur atas dasar harga Berlaku tahun 2017 mencapai 2,96 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 1,91 triliun rupiah. Kondisi serupa ditunjukkan PDRB atas dasar harga konstan yang mencapai 2,054 triliun rupiah pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 1,686 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur tahun 2017 adalah sebesar 5,11 persen. Sedangkan, selama lima tahun terakhir (2013-2017), pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2013, yakni sebesar 6,09 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Kaur menurut pengeluaran tahun 2017 sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga (67,16 persen). Impor mempunyai peran relatif besar untuk memenuhi permintaan domestik (79,18) persen. Pengeluaran kapital yang tercermin dalam pembentukan modal tetap bruto juga memiliki peran cukup besar, yakni sebesar 61,20 persen. Efisiensi modal untuk

meningkatkan PDRB pada tahun ini menurun dibandingkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan nilai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* Kabupaten Kaur yakni dari 5,01 ke 5,30 pada 2017. Komponen PDRB menurut pengeluaran lain yang memiliki peran cukup besar antara lain ekspor (25,97 persen) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (21,63 persen), sedangkan komponen lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan perubahan inventori memiliki peran relatif kecil, yakni kurang dari tiga persen.

Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing komponen PDRB tahun 2017 menunjukkan arah yang positif. Komponen ekspor dan PMTB menunjukkan pertumbuhan positif yang tertinggi, yakni masing-masing sebesar persen 6,88 persen dan 6,81 persen.

<https://kaurkab.bps.go.id>

<http://keurkab.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

<https://kaurkab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN DATA PDRB

PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional maupun regional setiap tahun. Manfaat dan analisis yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu wilayah.

Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://kaurkab.bps.go.id>

BAB 2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotika
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *mendeflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x $(30/7)$ x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;

3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara

cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{\sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADHB

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar** **dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi ADHK

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai

barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industrikonstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

a. Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK, maka PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk

bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-deflate PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK tersebut di “reflate”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara:

Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK adalah dengan cara men-deflate” PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai

eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK-nya diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang

jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua

- bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
 - d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
 - f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
 - h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb:

- menghitung posisi inventori ADHK, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHB dengan menginflata perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen.

<https://kaurkab.bps.go.id>

BAB 3

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KAUR BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013-2017

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kaur akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2013 sampai dengan 2017 tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kaur digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KAUR MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kaur menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif ditengah perlambatan ekonomi global maupun nasional. Peningkatan kondisi ekonomi Kabupaten Kaur digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013-2017

(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Konsumsi Rumah Tangga	1.261,89	1.430,73	1.643,48	1.821,34	1.988,029
2. Konsumsi LNPRT	47,99	57,70	61,89	67,17	73,54
3. Konsumsi Pemerintah	407,16	482,19	561,46	620,83	640,32
4. PMTB	1.071,97	1.246,46	1.427,83	1.626,57	1811,60
5. Perubahan Inventori	16,09	20,99	22,85	22,25	21,99
6. Ekspor	469,79	531,10	583,19	685,51	768,91
7. Impor	1.360,19	1.567,00	1.845,61	2.129,24	2.344,06
Total PDRB	1.914,70	2.202,18	2.455,11	2.714,45	2.960,34

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kaur atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2017, PDRB KaurADHB tercatat sebesar 2,96 triliun rupiah atau telah meningkat 54,61 persen dibanding PDRB Kaur tahun 2013.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 atau produksi yang dinilai dengan harga tetap, yakni harga pada tahun 2010. Penilaian pada harga yang sama ini menyebabkan PDRB ADHK dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh kenaikan atau penurunan harga). Informasi inilah yang sering digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi suatu daerah karena sudah melepaskan efek dari perubahan harga.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013-2017

(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.071,13	1.140,36	1.214,38	1.285,11	1.361,68
2. Konsumsi LNPRT	43,82	50,28	51,61	53,68	56,15
3. Konsumsi Pemerintah	356,07	387,92	415,33	424,81	420,92
4. PMTB	970,56	1.054,87	1.143,96	1.224,10	1307,53
5. Perubahan Inventori	11,09	13,44	14,02	12,85	12,32
6. Ekspor	428,62	445,06	456,27	495,94	530,04
7. Impor	1.194,72	1.324,07	1.439,76	1.541,84	1.634,41
Total PDRB	1.686,57	1.767,85	1.855,58	1.954,66	2.054,59

* Angka Sementara

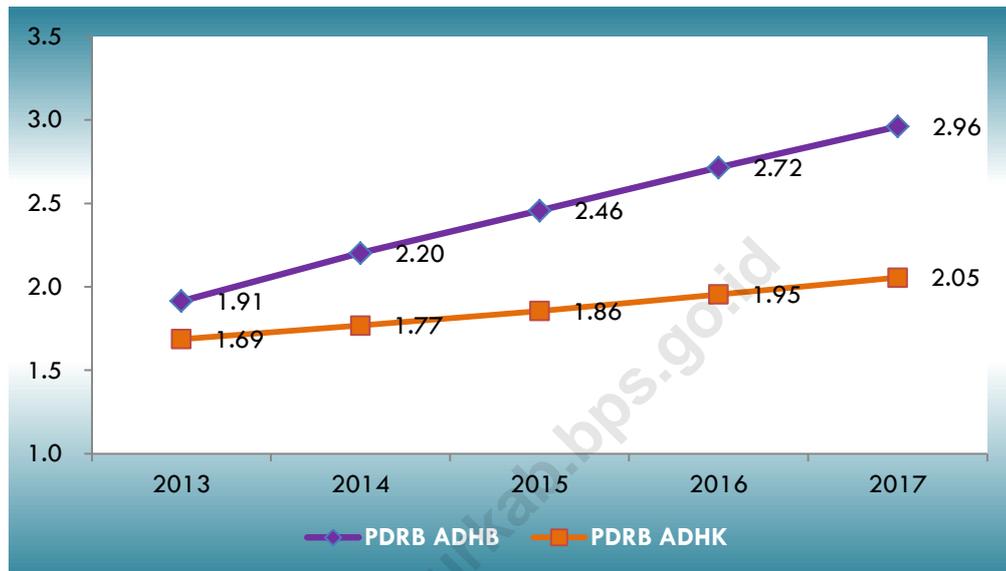
** Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu 2013-2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kaur berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2. Sama halnya dengan PDRB ADHB, sebagian besar komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, PDRB Kaur (ADHK) mencapai 2,05 triliun rupiah atau telah mengalami kenaikan sebesar 21,82 persen dibanding PDRB tahun 2012.

Dalam setiap perhitungan PDRB, umumnya nilai PDRB ADHK akan cenderung lebih kecil dibandingkan ADHB karena adanya kecenderungan harga yang selalu

meningkat setiap tahunnya. Oleh karena adanya peningkatan harga dan kuantitas secara bersamaan, PDRB ADHB akan cenderung lebih tinggi dibandingkan PDRB ADHK yang hanya melihat peningkatan kuantitas. Hal ini dapat terlihat jelas pada Grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur, Tahun 2013-2017 (Triliun Rupiah)



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Pada tahun 2013, PDRB ADHB Kabupaten Kaur mencapai 1,91 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK sebesar 1,69 triliun rupiah, kemudian tahun 2014 PDRB Kaur ADHB mencapai 2,20 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK sebesar 1,77 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan sebesar 15,01 persen pada PDRB ADHB dan 4,82 persen pada PDRB ADHK. Pada tahun-tahun berikutnya perbandingan antara PDRB ADHB dan ADHK terus mengalami kenaikan sebagaimana terlihat dalam indeks implisit pada Tabel 5. Semakin besarnya gap atau perbedaan antara PDRB ADHB dan ADHK menunjukkan harga, khususnya harga untuk produsen, di Kabupaten Kaur semakin tinggi.

Selama periode 2013 – 2017, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah

tangga, yakni di atas 65 persen (Tabel 3). Impor juga mempunyai peran relatif besar yakni sekitar 71 sampai dengan 80 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Besarnya angka impor di Kabupaten Kaur menunjukkan ketergantungan Kabupaten Kaur terhadap produk dari luar daerah Kaur digolongkan tinggi. Bahkan, ketergantungan ini semakin meningkat setiap tahunnya. Produk impor yang masuk ke Kaur didominasi oleh produk impor antar daerah (provinsi) sedangkan impor dari luar negeri masih sangat kecil.

Demikian halnya dengan impor, ekspor juga mempunyai peran yang cukup besar, yakni sekitar 25 persen. Selama periode 2013-2017 terjadi peningkatan peranan ekspor di Kabupaten Kaur. Pada tahun 2017 peranan ekspor di Kabupaten Kaur mulai membaik dengan peningkatan sebesar 0,72 persen poin dari tahun sebelumnya. Peranan ekspor pada tahun ini lebih besar dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan produk Kabupaten Kaur semakin dapat bersaing dan mampu menembus pasar nasional maupun internasional.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,91	64,97	66,94	67,10	67,16
2. Konsumsi LNPRT	2,51	2,62	2,52	2,47	2,48
3. Konsumsi Pemerintah	21,26	21,9	22,87	22,87	21,63
4. PMTB	55,99	56,6	58,16	59,92	61,20
5. Perubahan Inventori	0,84	0,95	0,93	0,82	0,74
6. Ekspor	24,54	24,12	23,75	25,25	25,97
7. Dikurangi Impor	71,04	71,16	75,17	78,44	79,18
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Di sisi lain, pengeluaran investasi yang tercermin melalui komponen PMTB dan perubahan inventori juga mempunyai peran yang cukup besar yaitu sekitar 55 sampai dengan 62 persen. Sementara itu, kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 21 sampai dengan 22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik masih cukup besar. Di sisi lain, pada tahun 2013-2017 perdagangan regional Kaur yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor. Kecenderungan perdagangan regional tersebut menunjukkan posisi

“defisit” atau terdapat saldo negatif dari komponen perdagangan (ekspor dan impor). Hal ini terjadi dengan memperhitungkan aktivitas keseluruhan dari ekspor maupun impor barang dan jasa baik dari aspek luar negeri ataupun antar daerah.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.22	6.46	6.49	5.82	5,96
2. Konsumsi LNPRT	7.47	14.74	2.64	4.02	5,28
3. Konsumsi Pemerintah	6.08	8.94	7.07	2.28	-0,92
4. PMTB	8.10	8.69	8.45	7.01	6,81
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	6.31	3.84	2.52	8.69	6,88
7. Impor	7.95	10.83	8.75	7.07	6,00
Total PDRB	6.09	4.82	4.96	5.34	5,11

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pertumbuhan ini diturunkan dari PDRB ADHK dengan melihat persentase perubahan dari angka tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur dari tahun 2013 s.d. 2017 secara rata-rata mencapai 5,27 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,09 persen (2013); 4,82 persen (2014); 4,96 Persen (2015); dan 5,34 persen (2016), 5,11 persen (2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ekonomi setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kaur di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

Secara keseluruhan, setiap komponen pengeluaran memiliki pertumbuhan yang positif atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, kenaikan setiap komponen pengeluaran juga diiringi kenaikan impor yang pesat. Tingginya nilai impor pada Tabel 1 menunjukkan pengeluaran penduduk Kaur banyak dikeluarkan ke luar daerah Kabupaten Kaur. Akibatnya, pengeluaran tersebut lebih banyak menstimulus perekonomian di luar daerah dibandingkan di daerah Kabupaten Kaur. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat ekonomi Kabupaten Kaur untuk tumbuh lebih tinggi.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kaur, Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	117,81	125,46	135,33	141,73	146,00
2. Konsumsi LNPRT	109,52	114,76	119,93	125,13	130,13
3. Konsumsi Pemerintah	114,35	124,30	135,19	146,14	152,13
4. PMTB	110,45	118,16	124,82	132,88	138,55
5. Ekspor	109,61	119,33	127,92	138,23	145,07
6. Impor	113,85	118,35	128,17	138,10	143,42
Total PDRB	113,53	124,57	132,31	138,87	144,08

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 s.d. 2017 cenderung meningkat setiap tahunnya. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 67,16 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 64,91 persen.

¹ Indeks perbandingan nilai PDRB adhb dengan PDRB adhk

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Meningkatnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013, secara umum setiap rumah tangga di Indonesia menghabiskan dana sekitar 41,06 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 51,04 juta rupiah (2014); menjadi 57,89 Juta rupiah (2015); 63,36 juta rupiah (2016); dan 68,39 juta rupiah (2017).

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kaur, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.261,89	1.430,73	1.643,48	1.821,34	1.988,03
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.071,13	1.140,36	1.214,38	1.285,11	1.361,68
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	65,91	64,97	66,97	67,10	67,16
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	45.611,63	51.035,52	57.895,00	63.362,01	68.392,38
b. ADHK 2010	38.716,35	40.677,64	42.779,49	44.707,16	46.844,75
Rata-rata konsumsipert-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	11.177,66	12.506,60	14.191,81	15.531,31	16.764,45
b. ADHK 2010	9.487,90	9.968,33	10.486,43	10.958,63	11.482,66
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	6,22	6,46	6,49	5,82	5,96
b. Per-Rumah Tangga	4,81	5,07	5,17	4,51	4,78
c. Perkapita	4,82	5,06	5,20	4,50	4,78
Jumlah Rumah Tangga (unit)	27.666	28.034	28.387	28.745	29.068
Jumlah penduduk (000 org)	112,894	114,398	115,805	117,269	118,586

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Sementara itu, pada perkiraan ADHK 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 4-6 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,17 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Kaur meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 4 s.d. 6 persen. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari sebesar 4,50 persen menjadi 4,78 persen.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK pada tahun 2013 sebesar 6,22 persen. Kemudian, hingga tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu berturut-turut sebesar 6,46 persen (2014), 6,49 persen (2015), dan 5,82 persen (2016). Sementara itu, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 5,96 persen. Peningkatan ini lebih disebabkan karena pertumbuhan penduduk melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” yakni selalu di atas 5 persen, lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang masih di bawah 2 persen.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kaur, Tahun 2013-2017³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	52,47	52,45	52,46	52,71	52,62
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,55	5,63	5,59	5,41	5,28
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,34	11,25	11,29	11,27	11,37
d. Kesehatan & Pendidikan	7,51	7,50	7,56	7,69	7,66
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,76	15,65	15,69	15,57	15,74
f. Hotel & Restoran	4,83	4,99	4,90	4,85	4,84
g. Lainnya	2,54	2,52	2,51	2,49	2,49
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Kaur, pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan hampir seimbang. Namun, jika diamati lebih jauh, secara rata-rata dari tahun 2013 sampai dengan 2017, terlihat bahwa konsumsi makanan sedikit lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan yaitu sebesar 52,54 persen. Proporsi pengeluaran makanan pun cenderung stagnan, yakni berada di sekitar 50 persen. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun adalah 52,47 persen (2013); 52,45 persen (2014); 52,46 persen (2015); 52,71 persen (2016); dan 52,54 persen (2017).

Pola proporsi konsumsi yang berfluktuasi menunjukkan adanya pergeseran pola antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan bukan makanan yang cukup terlihat pada penurunan konsumsi atas makanan. Sedangkan, pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kaur Tahun 2013-2017

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,91	5,94	5,97	5,82	5,51
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,67	6,12	6,31	3,78	4,93
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,02	7,36	7,67	6,57	6,26
d. Kesehatan & Pendidikan	6,73	7,29	7,82	6,44	5,58
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,00	7,21	6,27	5,50	7,48
f. Hotel & Restoran	7,82	7,81	7,95	6,46	6,36
g. Lainnya	7,13	4,69	7,11	5,76	7,22

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8 memperlihatkan fluktuasi pertumbuhan riil dari tiap kelompok konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Kaur. Pertumbuhan "riil" ini menunjukkan

adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017, pertumbuhan riil penggunaan konsumsi akhir rumah tangga terbesar terjadi pada kelompok konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya, yakni sebesar 7,48 persen. Selain itu, informasi ini juga menunjukkan terjadinya pertumbuhan yang lebih tinggi pada kelompok konsumsi bukan makanan. Oleh karena itu, hal ini bisa mengindikasikan peningkatan kemakmuran meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan penurunan harga pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 untuk sebagian besar kelompok konsumsi. Bahkan, pada tahun 2017 terjadi peningkatan harga yang terendah selama tahun 2013-2017. Secara umum, peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Harga pada kelompok makanan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya dimana tertinggi pada tahun 2015 (8,42 persen). Sementara itu, harga pada kelompok bukan makanan relatif berfluktuatif. Tahun 2017, harga kelompok konsumsi makanan maupun bukan makanan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kaur, Tahun 2013-2017⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,60	7,00	8,42	5,21	3,27
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,42	8,32	7,42	3,26	1,60
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,10	4,83	7,05	3,81	3,62
d. Kesehatan & Pendidikan	4,40	5,54	7,28	6,02	2,87
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,87	5,03	8,32	4,29	2,66
f. Hotel & Restoran	6,51	8,63	4,41	3,08	2,38
g. Lainnya	4,25	7,26	7,01	3,92	1,80

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT perannya secara ekonomi dalam PDRB menurut pengeluaran relatif kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Akan tetapi manfaat sosialnya cukup besar, karena ikut membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah ketahanan rumah tangga dan lainnya. Oleh karenanya perkembangan LNPRT sering menjadi sorotan tingkat kemajuan kepedulian sosial atau modernisasi suatu komunitas masyarakat. Data berikut menunjukkan peran LNPRT terhadap PDRB menurut pengeluaran antar periode waktu 2013 – 2017.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Kaur, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	47,99	57,70	61,89	67,17	73,54
b. ADHK (Miliar Rp)	43,82	50,28	51,61	53,68	56,52
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,51	2,62	2,52	2,47	2,48

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Besarnya konsumsi akhir LNPRT tahun 2017 sebesar 73,54 miliar rupiah. Kontribusi konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB menurut pengeluaran selama periode 2013-2017 relatif kecil yaitu berkisar antara 2,47 persen sampai dengan 2,62 persen. Kecilnya kontribusi konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB menunjukkan belum adanya peningkatan berarti peran LNPRT dalam PDRB Kabupaten Kaur. Keberadaan institusi lembaga non profit seperti partai politik, lembaga sosial dan keagamaan belum optimal dalam meningkatkan peran perkembangan demokrasi dan sosial dalam masyarakat.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Kaur serta bagaimana perkembangannya dapat diamati dari tabel berikut ini.

Secara total, pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan untuk ADHB, tetapi mengalami penurunan untuk ADHK 2010. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 362,39 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 640,32 miliar rupiah. Fenomena maraknya daerah pemekaran baru ikut memicu semakin naiknya pengeluaran konsumsi pemerintah setiap tahunnya. Selanjutnya jika ditinjau dari konsumsi pemerintah ADHK 2010, ternyata juga cenderung mengalami peningkatan walaupun terjadi penurunan di 2017.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kaur, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	407,16	482,19	561,46	620,83	640,32
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	356,07	387,92	415,33	424,81	420,92
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	21,26	21,9	22,87	22,87	21,63
Konsumsi Pemerintah perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	3.606,55	4.215,01	4.856,97	5.294,03	5.399,64
b. ADHK 2010	3.154,06	3.390,95	3.586,42	3.622,51	3.549,46
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	6,08	8,94	7,07	2,28	-0,92
b. Konsumsi perkapita	4,68	7,51	5,76	1,01	-2,02
Jumlah penduduk (000 org)	112,894	114,398	115,805	117,269	118,586

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB selama tahun 2013-2017 berkisar antara 21 persen sampai dengan 23 persen, atau tidak mengalami perubahan yang signifikan pada tiap tahunnya. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2016 yang mencapai 22,87 persen. Penurunan di 2017 cenderung didominasi karena pemotongan APBD Kabupaten Kaur lebih dari 100 Miliar di tahun 2017.

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan. Hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita ADHB sebesar 3,606 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat Tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita ADHK (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2017 (lihat Tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 4,68 persen pada tahun 2013, 7,51 persen pada tahun 2014 dan mulai menurun sampai 2017. Penurunan ini semakin tinggi pada periode 2016 ke 2017, yakni turun dari 1,01persen menjadi -2,02 persen.

Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi untuk total konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2014, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 8,94 persen. Pertumbuhan ini searah dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita. Pertumbuhan tertinggi untuk konsumsi pemerintah per kapita juga terjadi pada tahun yang sama, yakni sebesar 7,51persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 12. Perkembangan PMTB Kabupaten Kaur,
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.071,97	1.246,46	1.427,83	1.626,57	1.811,60
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	970,56	1.054,87	1.143,96	1.224,11	1.307,53
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	55,99	56,6	58,11	59,91	61,20

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir rumah tangga, PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Tabel 12 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan proporsi PMTB terhadap PDRB dalam kurun waktu 2013 – 2017 selalu meningkat dari 55,99 persen (2013) menjadi 61,20 persen (2017). Hal ini disebabkan pertumbuhan PMTB yang selalu positif dan cukup tinggi, yakni selalu di atas 6 persen. Akan tetapi, pertumbuhan ini dalam periode 2013-2017 mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Pada tahun 2013, pertumbuhan PMTB dapat mencapai 8,69 persen, sedangkan pada tahun 2017 PMTB hanya tumbuh sebesar 6,81 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori

dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Tabel 13. Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Kaur, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	16,09	20,99	22,85	22,25	21,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	11,09	13,44	14,02	12,85	12,32
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,84	0,95	0,93	0,82	0,74

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama periode tahun 2013 s.d 2016 perubahan inventori Kabupaten Kaur bernilai positif. Sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan. Akan tetapi, perubahan inventori tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan rata-rata proporsi selama periode tersebut sebesar 0,86 persen.

3.7 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus tersebut, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus akan terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya posisi defisit menyebabkan aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain hal tersebut, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor secara total. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2013-2017, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kaur dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif (Tabel 14). Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kaur selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih rendah dari impor menyebabkan aliran devisa keluar. Defisit perdagangan yang terjadi antara tahun 2013 sampai dengan 2017 tercatat masing-masing sebesar minus minus 890,4 miliar rupiah (2013); minus 1,04 triliun rupiah (2014); minus 1,26 triliun rupiah (2015); dan minus 1,44 triliun rupiah (2016), dan minus 1,57 triliun rupiah (2017). Angka negatif atau minus ini disebabkan rendahnya ekspor antar daerah dan masih terbatasnya produksi yang dihasilkan oleh masing-masing lapangan usaha (industri) sedangkan kebutuhan domestik Kabupaten Kaur semakin banyak dan beragam. Perkembangan e-commerce saat ini juga memberikan kemudahan akses penduduk Kaur untuk mengkonsumsi produksi di luar Kabupaten Kaur.

Tabel 14. Perkembangan Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Kaur Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	469,79	531,10	583,19	685,51	768,91
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.360,19	1.566,99	1.845,61	2.129,23	2.344,06
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	(890,40)	(1.035,89)	(1.262,41)	(1.443,72)	(1.575,15)
Rasio ekspor thdp Impor	0,35	0,34	0,32	0,32	0,33

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil selama 2013-2017. Tercatat rasio perdagangan tahun 2013 sebesar 0,35 sedikit menurun menjadi 0,33 pada tahun 2017. Penurunan rasio ini menunjukkan adanya peningkatan impor dari segi harga yang lebih cepat dibandingkan ekspor karena secara kuantitas pertumbuhan ekspor lebih besar dibandingkan impor, yakni 6,88 persen dibanding 6 persen.

<https://kaurkab.bps.go.id>

BAB 4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN KAUR MENURUT PENGELUARAN 2013-2017

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kaur Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	1.914,70	2.202,18	2.455,11	2.714,45	2.960,34
- ADHK 2010	1.686,57	1.767,85	1.855,58	1.954,63	2.054,59
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	16.960,16	19.250,14	21.200,37	23.147,17	24.963,67
- ADHK 2010	14.939,37	15.453,47	16.023,33	16.668,21	17.325,77
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK	4,69	3,44	3,69	4,02	3,95
Jumlah penduduk (000 org)	112,894	114,398	115,805	117,269	118,586
Pertumbuhan Penduduk	1,34	1,33	1,23	1,26	1,12

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Kaur menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 15), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” cenderung fluktuatif. Dari 2013 hingga 2015, pertumbuhan PDRB per-kapita cenderung mengalami penurunan. Pada periode 2015 ke 2016 pertumbuhan PDRB per kapita meningkat, tetapi pada tahun selanjutnya pendapatan per kapita kembali melambat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,26 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 16. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kaur Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	1.261,89	1.430,73	1.643,48	1.821,34	1.988,03
b. LNPRT	47,99	57,70	61,89	67,17	73,54
c. Pemerintah	407,16	482,19	561,46	620,83	640,32
Jumlah	1.717,04	1.970,62	2.266,84	2.509,34	2.701,89
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)					
	1.914,70	2.202,18	2.455,11	2.714,45	2.960,34
Proporsi	89,68	89,48	92,33	92,44	91,27

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lebih dari 80 persen barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Peningkatan konsumsi akhir seiring dengan peningkatan proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kaur
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	1.686,57	1.767,85	1.855,58	1.954,66	2.054,59
Perubahan (miliar rupiah)	96.87	81.28	87.74	99.08	99,93
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	428,62	445,06	456,27	495,94	530,042
ICOR	4.42	5.48	5.20	5.01	5.30

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Datapada Tabel 17 menunjukkan besaran *ICOR* sedikit meningkat dari 4,42 pada tahun 2013 menjadi 5,30 (2017). *ICOR* Kabupaten Kaur selama tahun 2013-2017 memiliki pergerakan yang fluktuatif yaitu masing-masing sebesar 4,42 (2013); 5,48 (2014), 5,20 (2015), dan 5,01 (2016), dan 5,30 (2017). Peningkatan *ICOR* pada tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan keefisienan modal yang direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur.

<https://kaurkab.bps.go.id>

BAB 5

PENUTUP

<https://kaurkab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kaur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 sampai dengan 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kaur terhadap ekonomi negara atau provinsi lain.

<https://kaurkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi RT (1.a. s/d 1.g.)	1.261.891,28	1.430.729,85	1.643.482,02	1.821.340,99	1.988.029,62
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	662.059,49	750.488,02	862.239,00	960.039,43	1.046.075,16
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	70.035,21	80.507,71	91.940,69	98.528,87	105.042,06
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengk & Peny. RT	143.045,02	161.002,03	185.981,09	205.313,30	226.077,22
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	94.815,48	107.356,60	124.178,71	140.127,53	152.194,47
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Bud.	198.890,90	223.958,33	257.783,11	283.644,79	312.952,80
1.f. Hotel dan Restoran	60.973,05	71.403,69	80.481,35	88.321,07	96.171,70
1.g. Lainnya	32.072,13	36.013,46	41.278,06	45.366,01	49.516,21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	47.993,39	57.699,81	61.893,12	67.174,88	73.543,25
3. Pengeluaran Kons. Pemerintah	407.158,12	482.188,15	561.460,86	620.826,15	640.321,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1.071.967,10	1.246.457,02	1.427.834,41	1.626.570,82	1.811.602,43
5. Perubahan Inventori	16.092,67	20.992,54	22.849,67	22.254,45	21.994,14
6. Ekspor	469.789,43	531.104,95	583.199,54	685.514,05	768.909,14
7. Impor	1.360.191,55	1.566.995,07	1.845.611,05	2.129.235,68	2.344.058,11
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	1.914.700,45	2.202.177,25	2.455.108,57	2.714.445,67	2.960.342,07

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 – 2017**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi RT (1.a. s.d. 1.g.)	1.071.126,58	1.140.357,08	1.214.381,50	1.285.107,29	1.361.683,05
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	567.501,51	601.221,89	637.100,23	674.208,73	711.351,71
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	59.213,54	62.837,73	66.802,80	69.327,94	72.746,91
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengk & Peny. RT	119.404,89	128.197,31	138.034,01	147.102,82	156.828,62
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	81.408,15	87.339,83	94.171,91	100.234,28	105.828,62
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Bud	164.525,42	176.392,55	187.445,29	197.759,94	212.544,38
1.f. Hotel dan Restoran	50.901,07	54.874,90	59.237,45	63.064,19	67.072,06
1.g. Lainnya	28.172,01	29.492,87	31.589,82	33.409,39	35.820,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	43.821,66	50.280,11	51.607,65	53.682,28	56.515,79
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	356.074,16	387.917,47	415.325,28	424.807,88	420.916,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	970.563,33	1.054.870,13	1.143.958,58	1.224.109,90	1.307.529,61
5. Perubahan Inventori	11.087,00	13.435,22	14.015,63	12.854,93	12.319,24
6. Ekspor	428.615,86	445.061,46	456.267,12	495.902,92	530.042,93
7. Impor	1.194.722,80	1.324.074,86	1.439.969,76	1.541.837,35	1.634.412,72
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	1.686.565,79	1.767.846,62	1.855.586,01	1.954.627,86	2.054.594,10

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi RT (1.a. s.d. 1.g.)	65,91	64,97	66,94	67,10	73,42
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,58	34,08	35,12	35,37	35,34
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,66	3,66	3,74	3,63	3,55
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengk. dan Peny. RT	7,47	7,31	7,56	7,56	7,64
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,95	4,88	5,06	5,16	5,14
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,39	10,17	10,50	10,45	10,57
1.f. Hotel dan Restoran	3,18	3,24	3,28	3,25	3,25
1.g. Lainnya	1,68	1,64	1,68	1,67	1,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,51	2,62	2,52	2,47	2,48
3. Pengeluaran Kons, Pemerintah	21,26	21,90	22,87	22,87	21,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	55,99	56,60	58,16	59,92	61,20
5. Perubahan Inventori	0,84	0,95	0,93	0,82	0,74
6. Ekspor	24,54	24,12	23,75	25,25	25,97
7. Impor	71,04	71,16	75,17	78,44	79,18
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 – 2017

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi RT (1.a. s.d. 1.g.)	6,22	6,46	6,49	5,82	5,96
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,91	5,94	5,97	5,82	5,51
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,67	6,12	6,31	3,78	4,93
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengk. dan Peny. RT	7,02	7,36	7,67	6,57	6,26
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,73	7,29	7,82	6,44	5,58
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,00	7,21	6,27	5,50	7,48
1.f. Hotel dan Restoran	7,82	7,81	7,95	6,46	6,36
1.g. Lainnya	7,13	4,69	7,11	5,76	7,22
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,47	14,74	2,64	4,02	5,28
3. Pengeluaran Kons. Pemerintah	6,08	8,94	7,07	2,28	-0,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	8,10	8,69	8,45	7,01	6,81
5. Perubahan Inventori	4,82	21,18	4,32	-8,28	-4,17
6. Ekspor	6,31	3,84	2,52	8,69	6,88
7. Impor	7,95	10,83	8,75	7,07	6,00
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	6,09	4,82	4,96	5,34	5,11

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi RT (1.a. s.d. 1.g.)	117,81	125,46	135,33	141,73	146,00
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	116,66	124,83	135,34	142,39	147,05
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	118,28	128,12	137,63	142,12	144,39
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengk. dan Peny. RT	119,80	125,59	134,45	139,57	144,63
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	116,47	122,92	131,86	139,80	143,81
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	120,89	126,97	137,52	143,43	147,24
1.f. Hotel dan Restoran	119,79	130,12	135,86	140,05	143,39
1.g. Lainnya	113,84	122,11	130,67	135,79	138,23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	109,52	114,76	119,93	125,13	130,13
3. Pengeluaran Kons, Pemerintah	114,35	124,30	135,19	146,14	152,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	110,45	118,16	124,82	132,88	138,55
5. Perubahan Inventori	145,15	156,25	163,03	173,12	178,53
6. Ekspor	109,61	119,33	127,82	138,23	145,07
7. Impor	113,85	118,35	128,17	138,10	143,42
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	113,53	124,57	132,31	138,87	144,08

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kaur Tahun 2013 - 2017**

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi RT (1.a. s.d. 1.g.)	5,99	6,50	7,87	4,72	3,01
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,60	7,00	8,42	5,21	3,27
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,42	8,32	7,42	3,26	1,60
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengk. dan Peny. RT	7,10	4,83	7,05	3,81	3,62
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,40	5,54	7,28	6,02	2,87
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,87	5,03	8,32	4,29	2,66
1.f. Hotel dan Restoran	6,51	8,63	4,41	3,08	2,38
1.g. Lainnya	4,25	7,26	7,01	3,92	1,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,02	4,78	4,51	4,34	3,99
3. Pengeluaran Kons, Pemerintah	5,92	8,71	8,76	8,11	4,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	7,00	6,98	5,63	6,46	4,27
5. Perubahan Inventori	17,89	7,65	4,34	6,19	3,13
6. Ekspor	2,73	8,87	7,11	8,14	4,95
7. Impor	6,68	3,95	8,30	7,75	3,85
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	5,25	9,73	6,21	4,96	3,75

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR***

Jl. Peltu M.Ilyas T.Panji Alam, Kompleks Perkantoran Pemkab Kaur, Padang Kempas, Bintuhan
Telp. (0739) 6180009 Fax : (0736) 6180002
Homepage://kaurkab.bps.go.id Email:bps1704@bps.go.id